



# LPT

Laporan Penundaan Transaksi

April  
2023

## PEMENUHAN ASPEK



Aspek penundaan transaksi yang terbanyak adalah **Aspek Formil Terpenuhi, Aspek Materil Tidak Terpenuhi**

## PIHAK PELAPOR



## JENIS TERLAPOR



## NOMINAL TRANSAKSI



## WILAYAH



## JENIS TRANSAKSI



## ALASAN PENUNDAAN



Pengguna Jasa melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan HK yang berasal dari hasil tindak pidana

Pengguna Jasa memiliki rekening untuk menampung HK yang berasal dari hasil tindak pidana

Pengguna Jasa diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu



● Pelaporan LPT dimulai sejak Januari 2013

Penerimaan Laporan Penundaan Transaksi pada April 2023

**22** Laporan

Pelaporan LPT bulan ini

**-65,63%**

Dibandingkan bulan Maret 2023 (m-to-m)

Pelaporan LPT bulan ini

**-75,82%**

Dibandingkan bulan April 2022 (y-on-y)

**Grafik 15. Jumlah LPT yang diterima PPATK per bulan selama 1 tahun terakhir**



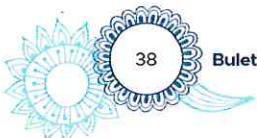
**Tabel 25. Jumlah LPT yang diterima PPATK berdasarkan Jenis Pihak Pelapor**

Kelompok Industri	2021	2022	2022												2023	
			Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
<b>Bank</b>	178	1.295	89	80	75	48	150	172	216	41	23	45	37	61	21	
Bank Umum	178	1.294	89	80	75	48	150	171	216	41	23	45	37	61	21	
Bank Asing	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bank Campuran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bank Milik Negara	23	44	3	1	1	-	2	2	2	3	-	4	8	10	8	
Bank Pembangunan Daerah	8	16	1	1	-	2	-	1	1	2	-	2	4	-	-	
Bank Swasta	141	1.234	85	78	74	46	148	168	213	36	23	39	25	51	13	
Bank Perkreditan Rakyat	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Non Bank	18	9	2	-	1	-	-	2	-	1	1	2	0	3	1	
<b>Total</b>	196	1.304	91	80	76	48	150	174	216	42	24	47	37	64	22	



**UU No. 8 Tahun 2010**  
Pasal (26) Ayat (1)

- Penyedia Jasa Keuangan dapat melakukan penundaan transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan transaksi dilakukan.
- Penundaan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pengguna Jasa
  - melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
  - memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); atau
  - diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.
- Pelaksanaan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara penundaan Transaksi.
- Penyedia jasa keuangan memberikan salinan berita acara penundaan Transaksi kepada Pengguna Jasa.
- Penyedia jasa keuangan wajib melaporkan penundaan Transaksi kepada PPATK dengan melampirkan berita acara penundaan Transaksi dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak waktu penundaan Transaksi dilakukan.
- Setelah menerima laporan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PPATK wajib memastikan pelaksanaan penundaan Transaksi dilakukan sesuai dengan Undang-Undang ini
- Dalam hal penundaan Transaksi telah dilakukan sampai dengan hari kerja kelima, penyedia jasa keuangan harus memutuskan akan melaksanakan Transaksi atau menolak Transaksi tersebut.



**Tabel 26. Jumlah LPT yang diterima PPATK berdasarkan Pemenuhan Aspek Formil dan Materil**

Pemenuhan Aspek Formil dan Aspek Materil	2021	2022	2022										2023			
			Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Aspek Formil dan Aspek Materil terpenuhi	62	19	1	-	-	2	3	2	2	-	2	2	1	3	-	
Aspek Formil terpenuhi, namun Aspek Materil tidak terpenuhi	130	1.232	90	77	74	44	114	170	214	36	20	42	32	57	17	
Aspek Formil tidak terpenuhi, namun Aspek Materil terpenuhi	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	
Aspek Formil dan Aspek Materil tidak terpenuhi	2	52	-	3	1	2	33	2	-	6	2	1	4	4	4	
<b>Total</b>	<b>196</b>	<b>1.304</b>	<b>91</b>	<b>80</b>	<b>76</b>	<b>48</b>	<b>150</b>	<b>174</b>	<b>216</b>	<b>42</b>	<b>24</b>	<b>47</b>	<b>37</b>	<b>64</b>	<b>22</b>	

**Tabel 27. Jumlah LPT yang diterima PPATK berdasarkan Kategori Nominal Transaksi yang Ditunda**

Kategori Nominal Transaksi	2021	2022	2022										2023			
			Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Dibawah 100 juta	149	1.284	90	80	75	46	147	172	214	42	22	8	16	24	11	
Rp100 Juta s.d. Rp1 Miliar	27	11	1	-	1	-	2	1	-	-	1	3	1	3	-	
Diatas Rp1 Miliar	20	9	-	-	-	2	1	1	2	-	1	1	-	1	1	
Tidak Terisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	20	36	10	
<b>Total</b>	<b>196</b>	<b>1304</b>	<b>91</b>	<b>80</b>	<b>76</b>	<b>48</b>	<b>150</b>	<b>174</b>	<b>216</b>	<b>42</b>	<b>24</b>	<b>47</b>	<b>37</b>	<b>64</b>	<b>22</b>	

**Tabel 28. Jumlah LPT yang diterima PPATK berdasarkan Jenis Transaksi yang Ditunda**

Jenis Transaksi	2021	2022	2022										2023			
			Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Electronic Banking <sup>*)</sup>	37	13	3	-	1	1	1	-	1	-	2	9	6	14	4	
Tarik/Setor Tunai	83	29	3	1	-	4	2	5	1	1	1	-	-	-	-	
Polis Asuransi	10	6	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	-	
Remittance	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lainnya	24	41	1	-	1	-	6	1	-	4	1	2	10	18	6	
Tidak Terisi	38	1.214	83	79	74	43	141	167	213	36	19	34	21	32	12	
<b>Total</b>	<b>196</b>	<b>1.304</b>	<b>91</b>	<b>80</b>	<b>76</b>	<b>48</b>	<b>150</b>	<b>174</b>	<b>216</b>	<b>42</b>	<b>24</b>	<b>47</b>	<b>37</b>	<b>64</b>	<b>22</b>	

Catatan:

\*) Electronic Banking meliputi Transfer Bank, Autodebet, ATM, E-Banking/Mobile Banking, dan sebagainya



**Tabel 29. Jumlah LPT yang diterima PPATK berdasarkan Jenis Terlapor dan Pekerjaan Utama Terlapor Perorangan**

Jenis Terlapor dan Pekerjaan Utama Terlapor Perorangan	2021	2022	2022									2023			
			Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
<b>Perorangan</b>	<b>160</b>	<b>1.294</b>	<b>90</b>	<b>80</b>	<b>76</b>	<b>46</b>	<b>150</b>	<b>174</b>	<b>215</b>	<b>39</b>	<b>24</b>	<b>45</b>	<b>36</b>	<b>63</b>	<b>22</b>
Pegawai Swasta	21	151	11	5	2	3	11	21	20	5	3	9	13	7	7
Pengusaha/ Wiraswasta	88	250	12	12	12	7	19	37	49	9	4	6	9	11	8
Pedagang	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PNS termasuk pensiunan	6	68	3	4	5	6	5	2	3	1	-	2	2	1	-
Ibu Rumah Tangga	12	124	6	3	5	4	12	28	22	5	4	5	5	11	-
Professional dan Konsultan	1	16	-	1	-	1	5	-	3	1	2	2	-	1	-
PEPs	-	8	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	1
Buruh	1	7	-	-	-	-	-	4	2	-	1	-	-	2	-
TNI/POLRI (termasuk Pensiunan)	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Pelajar/Mahasiswa	1	91	4	5	8	-	6	11	31	2	3	5	4	5	1
Pengajar/Dosen	-	8	1	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-
Lain-Lain	26	567	53	50	43	25	89	66	82	15	7	12	2	23	4
Pegawai BUMN	3	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Pegawai Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Petani dan Nelayan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1
<b>Korporasi</b>	<b>36</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>	<b>196</b>	<b>1.304</b>	<b>91</b>	<b>80</b>	<b>76</b>	<b>48</b>	<b>150</b>	<b>174</b>	<b>216</b>	<b>42</b>	<b>24</b>	<b>47</b>	<b>37</b>	<b>64</b>	<b>22</b>

**Tabel 30. Jumlah LPT yang diterima PPATK berdasarkan Jenis Alasan Penundaan Transaksi**

Alasan Penundaan Transaksi	2021	2022	2022									2023			
			Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pertimbangan (1) dan (2)	8	8	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
Pertimbangan (1) dan (3)	54	50	-	-	-	12	-	-	-	5	1	-	-	-	-
Pertimbangan (2) dan (3)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertimbangan (1) saja	37	25	2	-	2	1	3	4	3	-	2	3	8	13	2
Pertimbangan (2) saja	23	27	3	1	-	3	5	-	-	1	2	1	2	2	2
Pertimbangan (3) saja	40	13	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	4	-
Pertimbangan (1); (2) dan (3)	15	1.162	86	78	72	31	141	165	212	33	19	37	27	34	15
<b>Total</b>	<b>178</b>	<b>1.285</b>	<b>91</b>	<b>79</b>	<b>75</b>	<b>48</b>	<b>150</b>	<b>170</b>	<b>215</b>	<b>39</b>	<b>24</b>	<b>43</b>	<b>37</b>	<b>53</b>	<b>19</b>

Catatan:  
 Pertimbangan 1: Pengguna Jasa melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana  
 Pertimbangan 2: Pengguna Jasa memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana  
 Pertimbangan 3: Pengguna Jasa diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu

